

**ANALISIS NILAI PENTING DIKAWASAN KOTA BIMA
(KAJIAN MANEJEMEN SUMBERDAYA ARKEOLOGI)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Departemen Arkeologi
Universitas Hasanuddin

Oleh:

Anwar

F611 15 002

DEPARTEMEN ARKEOLOGI

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2020

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA

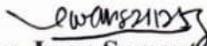
LEMBAR PENGESAHAN

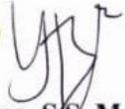
Sesuai Surat Tugas Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Nomor: **83/UN4.9.1/KEP/2019 tanggal 18 Februari 2019**, dengan ini kami menyatakan menerima dan menyetujui skripsi ini.

Makassar, 27 Oktober 2020

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Iwan Sumantri, M.A., M.Si.
Nip. 195912211987031005


Yusrina, S.S., M.A.
Nip. 198407042014042001


Disetujui untuk diteruskan
Kepada Panitia Ujian Skripsi.
Dekan,

u.b. Ketua Departemen Arkeologi
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin


Dr. Rosmawati, S.S., M.Si.
Nip. 197205022005012002

SKRIPSI

**ANALISIS NILAI PENTING DI KAWASAN KOTA BIMA
(KAJIAN MANAJEMEN SUMBERDAYA ARKEOLOGI)**

Disusun dan diajukan oleh

Anwar

Nomor Pokok : F611 15 002

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi

Pada tanggal 29 Desember 2020

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Menyetujui
Komisi Pembimbing,**



Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Iwan Sumantri, M.A., M.Si.

Nip. 195912211987031005

Yusriana, S.S., M.A.

Nip. 198407042014042001

Dekan,
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Akin Duli, M.A.

Nip. 196407161991031010

Ketua Departemen Arkeologi,
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin

Dr. Rosmawati, S.S., M.Si.

Nip. 197205022005012002

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA

Pada hari ini Selasa, 29 Desember 2020 Panitia Ujian Skripsi menerima dengan baik skripsi yang berjudul:

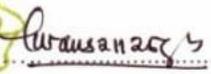
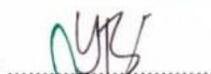
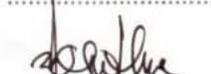
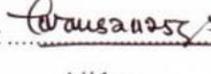
**ANALISIS NILAI PENTING DI KAWASAN KOTA BIMA
(KAJIAN MANAJEMEN SUMBERDAYA ARKEOLOGI)**

Yang diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Sastra pada Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

04 Januari 2021



Panitia Ujian Skripsi

- | | | |
|-----------------------------------|---------------|--|
| 1. Drs. Iwan Sumantri, M.A., M.Si | Ketua | :  |
| 2. Yusriana, S.S., M.A. | Sekretaris | :  |
| 3. Prof. Dr. Akin Duli, M.A. | Penguji I | :  |
| 4. Dr. Erni Erawati, Msi | Penguji II | :  |
| 5. Drs. Iwan Sumantri, M.A., M.Si | Pembimbing I | :  |
| 6. Yusriana, S.S., M.A. | Pembimbing II | :  |

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nam.a : **ANWAR**

NIM : **F6 II I 5002**

Departemen : **ARKEOLOGI**

Judul : **ANALISIS NILAI PENTING D[1(AWASAN KOTA BIMA
(KAJIAN MANEJEMEN SUMBERDAYA ARKEOLOGI)**

Menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian sendiri, jika dikemudian hari ternyata ditemukan Plagiarisme, maka saya bersedia mendapat sanksi sesuai hukum yang berlaku dan saya bertanggungjawab secara pribadi dan tidak melibatkan pembimbing dan penguji.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak lain.

Makassar 29 Desember 2020



Anwar

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul *Analisis Nilai Penting Dikawasan Kota Bima (Kajian manajemen sumberdaya arkeologi)* ini telah selesai. Selain itu, tak lupa kita mengirimkan shalawat kepada nabi besar Muhammad SAW., yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang kita rasakan pada saat ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu penyelesaian studi penulis hingga saat ini. Ucapan terima kasih tersebut penulis ucapkan kepada beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis. Tak ada cukup kata untuk menggambarkan rasa terima kasih atas segala doa dan dukungan yang tak henti kepada penulis
- 2) Penulis mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan beasiswa bidik misi kepada penulis, sehingga penulis dapat merasakan pendidikan di tingkat Universitas.
- 3) Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Hasanuddin dan Dekan Fakultas Ilmu Budaya selaku pimpinan yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis untuk merasakan pendidikan di Universitas Hasanuddin.

- 4) Bapak Prof. Dr. Akin Duli, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
- 5) Terima kasih penulis ucapkan kepada Ketua dan Sekretaris Departemen Arkeologi, yaitu Ibu Dr. Rosmawati, M.Si., dan Ibu Yusriana, M.A.
- 6) Terima kasih kepada Drs. Iwan Sumantri, M.A., M.Si., selaku penasehat akademik dan sekaligus pembimbing I yang telah mendukung secara moril dan materil bagi penulis, juga telah membagikan ilmunya dan mengarahkan skripsi ini sehingga layak untuk dibaca.
- 7) Terima kasih kepada Yusriana, S.S., M.A., yang telah menjadi pembimbing II dan telah banyak membantu penulis mulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi. Terima kasih atas kesabarannya dalam membimbing penulis dan telah membagi sedikit ilmu pengetahuannya kepada penulis.
- 8) Seluruh staf pengajar Departemen Arkeologi Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Akin Duli, M.A., Drs. Iwan Sumantri, M.A., M.Si., Dr. Rosmawati, M.Si., Dr. Muhammad Nur, S.S., M.A., Dr. Hasanuddin, M.A., Dr. Anwar Thosibo, M.Hum., Dr. Erni Erawati Lewa, M.Si., Dr. Khadijah Thahir Muda M.Si., Yadi Mulyadi, S.S., M.A., Yusriana, S.S., M.A., Supriadi, S.S., M.A., Asmunandar, S.S., M.A., Nur Ikhsan, S.S., M.A., A. Muhammad Saiful, S.S., M.A., Dr. H. Bahar Akkase Teng, Lc.P., M.Hum., Dr. Eng. Ilham Alimuddin, S.T., M.Gis., dan

Ir. H. Djamaluddin, MT. yang telah mengajar dan mendidik penulis selama menjadi mahasiswa/S1 di FIB UNHAS Makassar, terima kasih atas pengorbanan waktu dan ilmu yang diberikan kepada penulis dan kawan-kawan mahasiswa.

- 9) Terima kasih penulis sampaikan kepada bapak Syarifuddin yang telah membantu pengurusan akademik penulis selama menjadi mahasiswa di Departemen Arkeologi.
- 10) Terima kasih kepada kak Lukman Hakim, S.S. selaku pengelola Laboratorium Arkeologi yang telah membantu dalam menunjang kebutuhan penelitian penulis.
- 11) Terima kasih kepada kak Andi Oddang, S.S. selaku pengelola perpustakaan Departemen Arkeologi yang telah memberikan akses referensi bacaan demi kelancaran skripsi penulis.
- 12) Terima kasih kepada teman penulis, Saudara Adrianus Dipo Ramelan yang telah bersedia datang ke Bima untuk membantu penelitian penulis dan kebersamaan untuk beberapa semester. Semoga cepat menyusul skripsinya, Saudaraku.
- 13) Terima kasih kepada fotografer, Saudari Arini, S.S., yang telah bersedia datang ke Bima untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian serta kebersamaanya selama masa perkuliahan. Maaf atas ketidaknyamanan selama berada di daerah Bima, semoga gelar yang didapat dapat bermanfaat dan sehat selalu.

- 14) Terima kasih kepada deskriptor, Saudari Salmiah, S.S., yang telah bersedia membantu penulis dalam melakukan penelitian serta bersedia membantu, mengingatkan penulis, dan menanyakan terkait perkembangan skripsi penulis (perhatian yang luar biasa yang dirasakan penulis).
- 15) Terima kasih kepada Saudari Heradiani yang telah bersedia datang di Bima untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian. Terima kasih atas segala bantuannya.
- 16) Terima kasih kepada Saudari Evi Siti Rosdiyanti, S.S., beserta keluarganya yang telah bersedia menjadi pembaca sekaligus editor penulis dan sebagai penyedia tempat untuk berkumpul mengerjakan skripsi dan lain-lainnya.
- 17) Terima kasih kepada Saudari Cheryl Fhariza Oxisia Ramadani yang telah banyak membantu penulis di Bima. Jika ada waktu, sempatkanlah untuk berkunjung di Bima, penulis akan selalu menyambutmu.
- 18) Terima kasih untuk sahabatku semua yang pernah menginap di Ramsis Blok A, Lantai III, Kamar 309, yang telah menjadi bukti kebersamaan.
- 19) Terima kasih teman-temanku angkatan PILLBOX yang telah memberikan warna tersendiri bagi penulis. Mohon maaf untuk kalian semua, penulis tidak bisa menyebutnya satu per satu.
- 20) Terima kasih kepada adik-adikku yang ada di lembaga Kaisar FIB-UH (Keluarga Mahasiswa Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin), maupun yang baru datang. Selamat bergabung dan selamat berproses.

- 21) Terima kasih sahabat dan teman-temanku yang bergabung dalam IKAB (Ikatan Keluarga Mahasiswa Bidikmisi) Universitas Hasanuddin, terkhusus pada teman-teman yang satu kepengurusan dengan penulis atas dukungan dan kebersamaannya selama satu tahun lebih. Untuk adik-adiku, selamat bergabung di organisasi ini dan selamat berproses.
- 22) Terima kasih kepada adik-adik angkatan Pottery yang telah memberikan semangat sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
- 23) Terimakasih kepada adinda ku ipah bahya dari sastara indonesia yang telah menjadi editor penulis

Makassar, Agustus 2020

Anwar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENERIMAAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR FOTO	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRAC	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan Penelitian	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Metode Penelitian	6
1.6.1. Pengumpulan data	6
1.6.2. Pengolahan Data	8
1.7 Landasan Konseptual	9
1.8 Landasan Hukum	12
1.9 Sistematika Penulisan	14
BAB II PROFIL WILAYAH	16
2.1 Kondisi Geografis dan Sosial Budaya Kota Bima	16
2.2 Sejarah Singkat Perkembangan Kota Bima	17

2.2.1	Zaman Naka (Prasejarah)	17
2.2.2	Zaman Ncuhi (Proto Sejarah).....	18
2.2.3	Zaman Kerajaan (Zaman Klasik)	19
2.2.4	Zaman Kesultanan (Zaman Islam)	21
BAB III DESKRIPSI TINGALAN ARKEOLOGIS DI KOTA BIMA		27
3.1	Museum Asi Mbojo.....	27
3.2	Kompleks Makam Tolobali.....	31
3.3	Kompleks Makam Kesultanan Bima.....	35
BAB IV ANALISIS NILAI PENTING TINGGALAN ARKEOLOGIS DI KOTA BIMA		40
4.1	Nilai Penting Tinggalan Arkeologi Di Kota Bima.....	41
4.1.1	Istana Kesultanan Bima	41
4.1.2	Makam Kesultanan Bima.....	48
4.1.3	Kompleks Makam Tolo Bali.....	54
4.2	Tinggalan Arkeologis Di Kota Bima Dan Pelestarian Sejarah Kebudayaan Kota Bima.	60
BAB V PENUTUP.....		63
5.1	Kesimpulan.....	63
5.2	Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....		67
LAMPIRAN.....		71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta wilayah kota bima	17
Gambar 2 Denah Istana Kesultanan Bima tampak dari atas	30
Gambar 3 Denah kompleks Makam Tolo Bali tampak dari atas	33
Gambar 4 Denah kompleks Makam Kesultanan Bima tampak dari atas	36

DAFTAR FOTO

Foto 1 Keadaan Istana Kesultanan Bima pada tahun.....	28
Foto 2 Koleksi museum di lantai 1 peralatan perang dan tinggalan megalitik.....	28
Foto 3 Lingkungan sekitar bangunan, tampak kelihatan aktivitas masyarakat berjalan	29
Foto 4 Lingkungan kompleks Makam Tolo Bali	32
Foto 5 Makam Abdul Khair Sirajuddin di bagian dalam tampak dari arah utara	33
Foto 6 Cungkup makam Abdul Khair Sirajuddin tampak dari timur	33
Foto 7 Cungkup kompleks Makam Tolo Bali tampak dari timur	34
Foto 8 Bagian dalam cungkup kompleks makam tampak dari timur.....	34
Foto 9 Makam Karaeng Popo tampak dari utara.....	36
Foto 10 Makam Kesultanan Abdul kahir 1 tampak dari utara.....	37
Foto 11 Makam Sultan Abdul Khair 1 dari dalam kubah tampak dari utara.....	37
Foto 12 Makam Abdi Sultan Abdul Khair 1 tampak dari utara	37
Foto 13 Kamar tidur presiden pertama Ir. Soekarno dan foto presiden saat di Bima...	45
Foto 14 Kegiatan masyarakat yang di sekitar Museum Asi Mbojo.....	47
Foto 15 salah satu makam kubah dalam kompleks makam kesultanan bima	51
Foto 16 Kegiatan jiarah masyarakat yang dilakukan di kompleks makam kesultanan bima..	52
Foto 17 makam karaeng popo seorang tokoh dari makassar	54
Foto 18 Salah satu ukiran seni taligrafi pada kompleks Makam Tolo Bali	56

ABSTRAK

ANWAR. “ANALISIS NILAI PENTING DI KAWASAN KOTA BIMA KAJIAN MANAJEMEN SUMBERDAYA ARKEOLOGI” Dibimbing oleh **Iwan Sumantri** dan **Yusriana**.

Penelitian ini membahas mengenai objek arkeologi yang berada di Kota Bima. Fokus pembahasan penelitian ialah mengenai nilai penting yang terkandung pada objek arkeologi di Kota Bima. Adapun metode yang digunakan pada penelitian, yaitu studi pustaka, observasi, survei lapangan, dan wawancara. Kemudian, setelah itu dilakukan pengolahan data dan analisis nilai penting berdasarkan pada peraturan Undang-Undang Cagar Budaya Pasal 1 ayat (1) pada setiap objek arkeologi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek arkeologi yang ada di Kota Bima memiliki kandungan nilai penting, yaitu nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, dan nilai publik. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa tinggalan arkeologis di Kota Bima memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam kepentingan pendidikan dan pemanfaatan untuk kepariwisataan.

Kata Kunci: *Objek Arkeologi, Kota Bima, Nilai Penting, Pelestarian.*

ABSTRAC

ANWAR. “ANALYSIS OF IMPORTANT VALUES IN THE BIMA CITY AREA STUDY OF ARCHAEOLOGICAL RESOURCE MANAGEMEN”
Supervised By **Iwan Sumantri Dan Yusriana.**

This research discusses the archaeological objects in the city of Bima. The focus of the research discussion is about the important value contained in archaeological objects in Bima City. The methods used in this research are literature study, observation, field surveys and interviews. Then after that, data processing and analysis of important values are carried out based on the regulations of the Cultural Conservation Law Article 1 paragraph (1) on each archaeological object.

The results showed that archaeological objects in the city of Bima contain important values, namely historical importance, science, education, religion, culture and public values. Based on the results of this analysis, it can be concluded that the archaeological remains in the city of Bima have the potential to be used in the interests of education and utilization for tourism.

Keywords: *Archaeological Objects, Bima City, Important Values, Conservation.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Bima atau yang dikenal dengan *Dana Mbojo* memiliki perjalanan panjang dalam Kitab BO (Naskah Kuno Kerajaan dan Kesultanan Bima) yang menyebutkan tentang kedatangan seorang musafir dan bangsawan Jawa bergelar sang Bima di Pulau Satonda. Pada masa awal, wilayah Bima dipimpin oleh lima orang *ncuhi* yang terhubung dalam sebuah federasi. Pada perkembangan selanjutnya putra sang Bima yang bernama Indra Jamrud dan Indra Komala datang ke Tanah Bima, Indra Jamrud yang menjadi raja pertama dan pada saat itu Bima memasuki era perkembangan sejarah dan tata kota (Ismail, 2017).

Sejarah perkembangan Kota Bima terdiri dari dua fase perkembangan, yakni yang pertama fase prakolonial di mana tatanan kota yang semula seluruh kegiatan berfokus pada Istana Kesultanan Bima dan kedua adalah fase kolonial setelah Belanda menguasai Kerajaan Bima dan akhirnya semua kegiatan berfokus di luar istana.

Fase prakolonial merupakan awal dari perkembangan Kesultanan Bima. Pada fase ini infrastruktur pemerintahan Bima mulai dibangun, seperti istana yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, masjid sebagai pusat peribadatan agama Islam, dan lapangan sebagai pusat kegiatan sosial serta pemakaman Kesultanan Bima. Pada awalnya Istana Kesultanan Bima adalah bangunan kayu dengan tangga masuk yang

terbuat dari kayu. Namun, pada tahun 1920 istana dirombak oleh pemerintahan Belanda dengan bangunan yang bercirikan arsitektur kolonial. Pusat kota yang meliputi istana menjadi pusat seluruh kegiatan pemerintahan yang mengakomodir semua urusan kerakyatan dan hubungan antarkerajaan di luar Bima.

Perkembangan selanjutnya adalah pemukiman yang mulai tumbuh seperti kampung Melayu. Menurut informasi kampung ini, tradisi dibuka pada abad XVII oleh Sultan Bima kedua, Abdul Khair Sirajuddin bagi orang-orang Melayu yang dipercaya menyebarkan Islam dan mengontrol ajaran Islam. Selain orang-orang Melayu ada juga pemukiman bagi orang-orang Bugis, Arab, China, dan Belanda di sebelah timur laut istana (Anonim, 2000). Selain pemukiman yang berkembang pada masa itu, juga terdapat unsur lain, seperti kompleks makam-makam Kesultanan Bima yang terbagi atas tiga wilayah, yaitu kompleks makam pertama yang berada di atas bukit dengan ketinggian makam 60 m dari permukaan laut, makam kedua berada di sebelah utara Istana Kesultanan Bima dengan ketinggian 7 m dari permukaan laut, sedangkan makam ketiga berada di depan Masjid Kesultanan Bima.

Pada fase Kolonial pola keruangan Kota Bima ditandai dengan kehidupan di luar istana. Pada fase ini, perlahan-lahan pemerintah Belanda mulai membangun fasilitas yang menunjang sistem pemerintahan, antara lain seperti kantor militer, kantor residen Belanda, dan penjara. Selain itu dibangun pula kantor parlemen Belanda, kantor *Controleur* yang mengurus masalah dagang, dan kantor pengadilan Belanda. Pada awal pemerintahannya, Belanda melakukan pembangunan di sekitar pelabuhan akan tetapi pada abad XX dipindahkan ke bagian timur istana, tepatnya

berada di Desa Raba. Selain itu pemukiman selanjutnya dibangun meluas di daerah ini, bangunan-bangunan yang didirikan, diantaranya kediaman residen Belanda, barak–barak militer Belanda, rumah pejabat Belanda dari kalangan Belanda sendiri, maupun Pribumi (Tanwir, 2009).

Dalam buku yang berjudul “Kerajaan Tradisional di Indonesia: Bima” dijelaskan bahwa terdapat beberapa temuan arkeologi dari masa sebelum perang. Namun, sangat sedikit yang menginformasikan nilai kesejarahan yang terkandung pada peninggalan tersebut. Meskipun penelitian sudah mulai digalakkan sejak tahun 1976 oleh Pusat Arkeologi Nasional, penelitian itu lebih banyak bersifat pengulangan atau melakukan inventarisasi dan dokumentasi temuan yang telah dan yang belum dilaporkan sebelumnya, sehingga hasilnya belum menunjukkan kemajuan yang berarti (Haris, et al., 1997).

Perkembangan Kota Bima saat ini terus melaju. Tidak tertutup kemungkinan sejarah panjang Kota Bima akan hilang jika tidak lagi ada perhatian terhadap tinggalan arkeologis yang menjadi bukti sejarah tersebut. Beberapa bangunan telah dimanfaatkan kembali dengan kebutuhan saat ini. Namun, ada pula yang tidak difungsikan sama sekali. Pada faktanya, perubahan fungsi bangunan berhubungan erat dengan perubahan pada fisik bangunan, guna menyesuaikan dengan kebutuhan fungsi baru tersebut. Perubahan lain yang memiliki hubungan cukup erat dengan perubahan seperti penggantian bagian bangunan seperti atap, jendela, pintu dengan alasan kekurangan bahan yang sama (Antariksa, Ningtyas, & Usman, 2010).

Perubahan fungsi yang terjadi di kawasan Kota Bima sudah banyak terjadi, salah satunya adalah tinggalan Istana Kesultanan Bima yang berdiri dari abad XVI–XX. Pada tahun 1953 objek tersebut berubah fungsi sebagai Asrama Tentara dan Kampus Tarbiah Sunan Ampel Mataram. Kemudian, pada saat ini Istana Kesultanan Bima berfungsi sebagai Museum *Asi Mbojo*.

Pemanfaatan objek arkeologi di Kota Bima yang mengalami perubahan fungsi dan perubahan bahan dapat berpotensi mengurangi nilai yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya, pembiaran tinggalan arkeologi yang bernilai dapat menghilangkan bukti sejarah perjalanan kota Bima. Maka dari itu, perlu adanya kajian sistematis mengenai nilai penting setiap tinggalan arkeologis di Kota Bima, sebagai upaya pengendalian pemanfaatan bangunan yang tidak sesuai dengan prinsip pelestarian bangunan bersejarah. Selain itu, analisis nilai penting tinggalan arkeologi juga dibutuhkan dalam kepentingan kebijakan pelestarian guna membangun kembali memori masyarakat tentang sejarah dan budaya Kota Bima.

1.2 Permasalahan Penelitian

Beberapa warisan budaya yang ada di kawasan Kota Bima sudah banyak yang beralih fungsi dan bahkan ada pula yang dibiarkan tidak termanfaatkan. Jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus akan berpotensi menghilangkan nilai yang terkandung di setiap cagar budaya di Kawasan Kota Bima. Salah satu bentuk pemanfaatan terhadap tinggalan arkeologis ialah menjadi daya tarik wisata. Pemanfaatan menjadi objek wisata memberikan dampak positif dan negatif. Dari sisi

ekonomi, masyarakat dapat memperoleh manfaat, tetapi apabila pemanfaatan lahan tidak tertata dengan baik, bisa jadi akan berdampak negatif terhadap kelangsungan bangunan bersejarah. Pertanyaan yang muncul kemudian, **apakah tinggalan arkeologi di Kota Bima memiliki kandungan nilai penting yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan pelestarian sejarah kebudayaan Kota Bima?** Guna menjawab persoalan tersebut, maka diperlukan kajian mengenai nilai penting yang terkandung di dalam situs yang ada di Kota Bima. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis merumuskan dua pertanyaan penelitian.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi tinggalan arkeologis yang ada di Kota Bima saat ini?
2. Nilai penting apa saja yang terkandung dalam setiap tinggalan arkeologis di Kota Bima?

1.4 Tujuan penelitian

1. Mengetahui kondisi tinggalan arkeologis di Kota Bima.
2. Mengetahui nilai penting yang terkandung dalam tinggalan arkeologis di Kota Bima.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Akademik
 - a. Menambah wawasan mengenai nilai penting cagar budaya.
 - b. Menambah wawasan mengenai tinggalan arkeologis yang ada di Kota Bima.

2. Praktis

- a. Menjadi acuan pemerintah dalam melakukan pelestarian terhadap tinggalan arkeologis yang ada pada Kota Bima.
- b. Menambah wawasan masyarakat tentang tinggalan arkeologis di Kota Bima.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian nilai penting cagar budaya yang ada di Kota Bima, secara umum ada dua metode yang digunakan, antara lain sebagai berikut

1.6.1. Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk nilai penting situs arkeologi yang berada di Kota Bima, diawali dengan tiga tahap, meliputi studi pustaka, observasi secara langsung di lapangan, dan dilakukan survei serta pengambilan data, yakni sebagai berikut

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan pada tahap awal dengan mencari literatur mengenai tinggalan arkeologis yang ada pada Kota Bima dan sekitarnya, baik dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal di Perpustakaan Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, dan artikel-artikel di internet. Selain itu, untuk lebih mendalam dikumpulkan data sejarah di perpustakaan dan arsip daerah Kota Bima.

2. Observasi

Setelah dilakukan studi pustaka, maka dilakukan observasi secara langsung untuk memastikan data tersebut benar. Observasi dilakukan di Kota

Bima selama kurang lebih satu minggu. Kunjungan dilakukan di beberapa tempat, di antaranya Bangunan Istana Kesultanan Bima, kompleks Makam Kesultanan Bima, dan kompleks Makam Tolo Bali.

3. Survei Lapangan

Survei dilakukan untuk melihat keadaan Kota Bima secara keseluruhan dan mengumpulkan data lapangan yang diperlukan, seperti deskripsi, dokumentasi, dan observasi keadaan situs yang ada di Bima. Untuk meminimalisir kesalahan dan kekurangan data, maka dalam melakukan pengumpulan data tersebut dibagi menjadi beberapa tim. Sehingga, data yang diperlukan dapat terkumpul secara maksimal.

4. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, di mana teknik pengambilan sampel sumber data dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud misalnya orang yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian (Ulwan, 2014).

Dalam penelitian ini, dilakukan pencarian informasi mengenai sejarah kawasan di Kota Bima untuk memenuhi data yang diperlukan. Pemilihan narasumber yang diperlukan adalah orang yang mengetahui sejarah perkembangan Kota Bima. Wawancara diperlukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai

hubungan situs arkeologi dengan masyarakat sekitar dan menggali informasi lebih mendalam mengenai situs tersebut, seperti kepemilikan lahan dan pengelolaannya.

1.6.2. Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul melalui metode pertama, maka tahap selanjutnya diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan masalah yang tertera di atas. Maka, pengelolaan data tersebut sebagai berikut.

- a. Pertama, melakukan pendeskripsian semua temuan yang ada di Kota Bima, seperti Situs Kompleks Makam Kesultanan Bima (Kompleks Makam Danatraha), kompleks Makam Talo Bali, dan Istana Kesultanan Bima (Museum Asi Mbojo). Setelah dilakukan pendeskripsian, hal yang dilakukan selanjutnya adalah dokumentasi wawancara di setiap situs yang ada di Kota Bima.
- b. Setelah dilakukan pendeskripsian, selanjutnya dilakukan plotting di setiap situs dan membuat peta persebaran situs, yaitu peta topografi.
- c. Tahap selanjutnya adalah membuat dugaan nilai penting (signifikasi) kelayakan situs.
- d. Penjelasan dan penentuan nilai penting dalam penelitian ini adalah deskriptif.
- e. Penentuan nilai penting terhadap situs arkeologi yang ada di Kota Bima tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 tentang Cagar Budaya. Beberapa nilai penting tersebut, antara lain, nilai penting sejarah, nilai penting arkeologi, nilai penting arsitektur, nilai penting agama, dan nilai penting publik.

1.7 Landasan Konseptual

1.7.1 Pengertian Pelestarian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelestarian adalah sebuah proses, cara, perbuatan melestarikan. Jadi, pelestarian adalah proses penjaminan sumberdaya budaya yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan sumberdaya budaya tetap ada di masa yang akan datang (KBBI, 2016).

Dalam Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 pada Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 pada ayat (22), menyebutkan bahwa pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Pada ayat selanjutnya menjelaskan mengenai perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan (Anonim, 2017).

Pelestarian berasal dari kata dasar lestari, yang artinya adalah tetap selama-lamanya tidak berubah. Penggunaan awalan ke- dan akhiran -an yang artinya digunakan untuk menggambarkan sebuah proses atau upaya (kata kerja). Maka, pelestarian adalah upaya untuk membuat sesuatu tetap selama-lamanya tidak berubah atau upaya mempertahankan sesuatu supaya tetap sebagaimana adanya (Pratama, 2014).

Pelestarian dalam konteks cagar budaya dapat dimaknai sebagai upaya pengelolaan cagar budaya yang menjamin kemanfaatannya secara bijaksana serta menjamin kesinambungan persediaannya tetap memelihara dan meningkatkan

kualitas nilai dan keanekaragamannya. Dengan kata lain, hakikat dari pelestarian cagar budaya adalah suatu kegiatan berkesinambungan (*sustainable activity*) yang dilakukan secara terus menerus dengan perencanaan yang matang dan sistematis, sehingga kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang merupakan pemilik sah cagar budaya (Mulyadi, 2011).

Pelestarian cagar budaya adalah segenap proses konservasi, interpretasi, dan manajemen terhadap suatu kawasan agar makna kultural yang terkandung dapat terpelihara dengan baik. Dalam sebuah pelestarian kawasan cagar budaya perlu disediakan kesempatan kepada masyarakat yang bertanggungjawab kultural terhadap kawasan tersebut untuk ikut berpartisipasi dalam proses pelestarian. Kriteria pelestarian dapat diukur dari kekhasan kawasan, kesejarahan kawasan, keistimewaan kawasan, dan partisipasi masyarakat (Wirastari & Supriharjo, 2012). Pelestarian merupakan segala upaya untuk memperpanjang usia benda cagar budaya dan situs dengan cara perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan (Anonim, 2009).

Dari beberapa pengertian pelestarian di atas dapat disimpulkan bahwa pelestarian adalah sebuah tindakan penyelamatan atau upaya untuk mempertahankan sebuah cagar budaya agar tetap pada konteks sistem dan melakukan perubahan fisik seminimal mungkin dari cagar budaya, agar nilai yang terkandung dalam cagar budaya tersebut tidak berkurang.

1.7.2 Kriteria Nilai Penting

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada Bab III tentang kriteria cagar budaya pada bagian pertama benda, bangunan, dan struktur. Pada pasal 5 yang berbunyi “Benda, bangunan, dan struktur dapat diusulkan sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya apabila memenuhi kriteria. Pertama, berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; Kedua, mewakili masa gaya paling singkat 50 tahun; Ketiga, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan; dan Keempat, memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.” (Anonim,2010)

Dalam Piagam Burra (1999) disebutkan beberapa nilai penting terhadap cagar budaya, seperti nilai penting estetika, nilai penting arsitektur, nilai penting sejarah, dan nilai penting ilmu pengetahuan (Sullifan & Pearson, 1999). Daud Aris Tanudirjo dalam artikelnya berjudul “Penetapan Nilai Penting dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya” menyebutkan beberapa nilai penting sumberdaya arkeologi, di antaranya ilmu pengetahuan, substantif, antropologi, ilmu sosial, arsitektural, metodologi, sejarah, etnik, publik, estetis, kelangkaan, hukum, dan pendanaan (Tanudirjo, t.thn.).

Stanov Purnawibowo dalam artikel berjudul “Identifikasi Nilai Penting Arkeologis Ceruk Hunian Prasejarah di Takendong” dalam penelitiannya menyebutkan beberapa kriteria nilai penting, antara lain, nilai penting sejarah, nilai

penting ilmu pengetahuan, nilai penting kebudayaan, nilai penting pendidikan, dan nilai penting ekonomi dan pariwisata (Purnawibowo, 2017).

Dalam buku yang berjudul “Direktori Potensi Wisata Budaya di Kawasan Karst Maros—Pangkep, Sulawesi Selatan Indonesia” menyebutkan dua nilai penting, yaitu nilai penting spiritual dan nilai penting gotong royong. Nilai penting spiritual mencerminkan adanya kepercayaan terhadap sesuatu yang berkuasa atas mereka, oleh karenanya mereka berusaha membatasi perilakunya. Berkenaan dengan itu, sikap yang perlu diwarisi adalah sikap penghormatan kepada yang lain, yang akan mengatur perilaku agar tidak semaunya, dan penghormatan serta pemujaan sebagai dasar keagamaan. Sedangkan nilai penting gotong royong masyarakat prasejarah hidup secara berkelompok, bekerja bersama-sama untuk kepentingan kelompok, bahkan membangun rumah—sebagai salah satu contoh kecilnya—juga dilakukan secara bersama-sama (Anonim, 2007).

1.8 Landasan Hukum

Negara-negara berkembang seperti Indonesia—khususnya—untuk meminimalisir dampak dari kerusakan atau yang dapat mengancam keberadaan sumber daya budaya agar tetap lestari, perlu adanya regulasi hukum sebagai dasar dalam proses pengelolaan cagar budaya. Selain alasan di atas, diperlukan adanya perangkat yang bertugas khusus di bidang kebudayaan.

Payung hukum atau pedoman yang dibuat memang bertujuan untuk memperkuat dan melestarikan warisan budaya yang memiliki nilai penting dan bisa

dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Pedoman yang dijadikan sebagai acuan adalah peraturan tingkat internasional yang merupakan kesepakatan bersama dengan petinggi-petinggi di berbagai negara di dunia (konvensi) dan peraturan tingkat nasional yang merupakan kesepakatan dari pemerintah pusat untuk mengatur pelestarian dan pemanfaatan terhadap cagar budaya. Pedoman-pedoman dan peraturan mengenai cagar budaya terbagi dua, berikut penjelasannya.

1.8.1 Pedoman Internasional

Pedoman Internasional yang mencakup tentang benda cagar budaya, yaitu:

- a. Peraturan dan pedoman yang pertama, yaitu (*International Charter for The Conservation and Restoration of Monuments and Sites*) piagam Burra ditetapkan oleh ICOMOS, Australia pada tanggal 19 Agustus 1979 di Burra. revisi dilakukan pada tanggal 23 Februari 1981 dan berlaku pada tanggal 23 November 1999.
- b. Piagam Venice yang mengatur tentang *International Charter for The Conservation and Restoration of Monuments and Sites* yang dikeluarkan oleh ICOMOS 1965.
- c. Konvensi Warisan Dunia (*The World Heritage Convention*), *Convention Concerning The Protection of The World Cultural and Natural Heritage*, UNESCO pada tahun 1972.

1.8.2 Pedoman dan Aturan Nasional

Sumberdaya arkeologi merupakan salah satu dari warisan budaya yang banyak dimanfaatkan sebagai objek wisata dan kepentingan di dalamnya, maka dari itu perlu mendapatkan perhatian yang besar dalam hal pengelolaan untuk skala nasional sendiri. Ada beberapa peraturan dan regulasi yang dikeluarkan, baik oleh pemerintah pusat, maupun tingkat daerah, di antaranya sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010
- b. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs.
- c. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum.
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan.
- e. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana dan Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tataruang Wilayah Kota Bima 2011—2031.

1.9 Sistematika Penulisan

Untuk membantu mempermudah pembahasan skripsi maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab I dengan judul pendahuluan, berisi tentang latar belakang penelitian dan penulisan skripsi. Selain itu, berisi tentang rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan landasan konseptual serta metode penelitian.

Bab II dengan judul profil wilayah, membahas tentang penjelasan mengenai kondisi geografis daerah penelitian, sosial budaya masyarakat, serta sejarah singkat daerah penelitian.

Bab III diberi judul tentang deskripsi tinggalan arkeologi, berisi tentang apa saja tinggalan yang ada di Kota Kuno Bima yang mendukung dan berkaitan tentang penelitian ini.

Bab IV dengan judul tentang analisis nilai penting tinggalan arkeologi di Kota Bima, berisi penjelasan mengenai nilai penting pada masing-masing tinggalan arkeologi yang ada.

Bab V dengan judul penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang dilakukan.

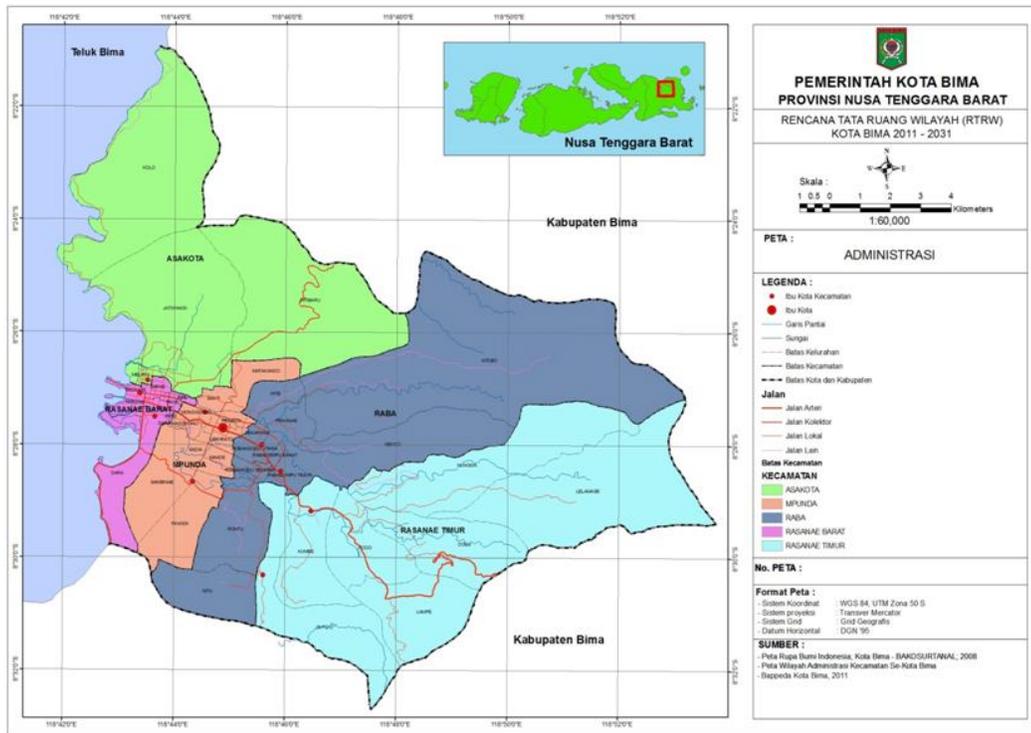
BAB II

PROFIL WILAYAH

2.1 Kondisi Geografis dan Sosial Budaya Kota Bima

Kabupaten Bima terletak di bagian timur Pulau Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan posisi $0^{\circ}11' - 0^{\circ}49'$ LS dan $08^{\circ} 8,0'' - 9,5'' - 118^{\circ} 28' 35''$ (*lebih koordinatnya*) BT. Daerah ini berbatasan dengan sebelah Utara berbatasan dengan laut flores, Timur (sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Selat Sape, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Dompu. Luas daerah Kota Bima $4.374,65 \text{ km}^2$ atau 22,5% dari total luas Propinsi Nusa Tenggara Barat. Secara administrasi, Kabupaten Bima terdiri dari 18 kecamatan dan terdiri dari 186 desa. Sedangkan geografis wilayah Kabupaten Bima sebagian besar 70% merupakan dataran tinggi bertekstur pegunungan, sementara sisanya 30% adalah daratan, sekitar 14% merupakan daratan rendah area persawahan dan lebih dari separu merupakan lahan kering (Fazani, 2012).

Jumlah penduduk Kota Bima pada tahun 2018 terakhir ini adalah 159,736 juta jiwa dengan pembagian jumlah laki-laki 81,725 dan jumlah perempuan sekitar 84,682 juta jiwa. Dengan mata pencarian secara umum pada masyarakat Kota Bima, antara lain, masyarakat daerah pesisir pantai Kota Bima pada umumnya mencari ikan dan menjadi penjual di pinggir pantai. Sedangkan, pada daerah pedalaman masyarakat bekerja sebagai pengolah lahan pertanian yang mereka tanam sendiri, seperti padi, jagung, kacang panjang, dan lain-lain. Selain itu, ada beberapa masyarakat bekerja sebagai pegawai negeri (Anonim, 2018).



Gambar .1 Peta Kota Bima (Sumber : Rencana Tata Ruang Kota Bima, 2011-2031)

2.2 Sejarah Singkat Perkembangan Kota Bima

2.2.1 Zaman Naka (Prasejarah)

Pada zaman prasejarah, masyarakat Bima belum mengenal yang namanya sistem pengetahuan, teknologi pertanian, peternakan, perniagaan, atau pelayaran. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka mencari dan mengumpulkan makanan yang tersedia di sekitar mereka, seperti umbi-umbian, biji-bijian, dan buah-buahan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain mencari dan mengumpulkan makanan, mereka juga sudah mulai gemar berburu. Kehidupan masyarakat pada zaman Naka selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka juga sudah

mengenal yang namanya kepercayaan, yaitu agama *makakamba* dan *makakimbi* atau yang biasa dikenal dengan agama animisme dan dinamisme. Menurut keyakinan tersebut alam beserta isinya diciptakan oleh yang maha kuasa yang disebut sebagai *parafu* dalam bahasa Bima atau Tuhan. Tempat *parafu* bersemayam adalah mata air, pohon-pohon besar, dan batu-batu besar (Nurlailah, 2013).

Upacara yang dilakukan masyarakat disebut upacara *tobo dore*, dalam upacara ini dibacakan mantra atau doa serta persembahan sesajen dan penyembelihan hewan. Upacara tersebut dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut Naka. Naka bukan hanya seorang pemimpin agama, tetapi Naka juga merupakan pimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat sangat menghormatinya, sehingga masyarakat pada masa itu selain menyembah *parafu*, mereka juga sangat menghormati arwah leluhur terutama arwah Naka (Malinggi A. , 2013).

2.2.2 Zaman Ncuhi (Proto Sejarah)

Pada zaman Ncuhi sekitar abad ke-8 M, masyarakat sudah menerima pedagang dan musafir dari beberapa daerah, seperti Jawa, Sulawesi Selatan, Sumatera, dan Ternate. Di sini masyarakat Bima sudah mulai mengenal sistem pengetahuan, teknologi, peternakan, pertukangan, serta perniagaan. Pada saat inilah masyarakat mulai menetap dan mendirikan rumah. Zaman Ncuhi adalah zaman awal kemajuan yang disebut Ncuhi dan pimpinan pada saat itu disebut Ncuhi. Ncuhi bukan hanya sebagai pemimpin pemerintahan, tetapi juga sebagai pimpinan agama pada masa Ncuhi, karena masyarakat masih menganut agama *makakamba* dan *makakimbi*.

Hubungan masyarakat Bima dengan pedagang dari luar mulai mendalam dan kehidupan masyarakat Bima semakin lama semakin maju dan bertambah makmur serta sejahterah. Maka para Ncuhi mengadakan *mbolo ro dampa* yang artinya musawarah dan mufakat untuk menentukan pemimpin. Hasil musawarah tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Masyarakat dan seluruh Ncuhi mengangkat Ncuhi Dara sebagai pimpinan masyarakat Bima.
2. Ncuhi Parewa diangkat menjadi pimpinan di wilayah Selatan Bima yaitu di Kecamatan Belo, Woha, dan Monta sekarang ini.
3. Ncuhi Bangga Pupa diangkat menjadi pimpinan di wilayah Utara Bima yaitu kecamatan Wera sekarang ini.
4. Ncuhi Bolo diangkat menjadi pimpinan di Barat Bima, yaitu di Kecamatan Bolo dan Donggo sekarang ini.
5. Ncuhi Doro Wani diangkat menjadi pimpinan di wilayah Timur Bima, yaitu Kecamatan Wawo dan Sape saat ini.

Kelima Ncuhi tetap hidup berdampingan secara damai, saling menghormati dan tetap melakukan musawarah dan mufakat, dari kelima Ncuhi yang bertindak sebagai pimpinan adalah Ncuhi Dara (Mariati, 2013)

2.2.3 Zaman Kerajaan (Zaman Klasik)

Asal mula munculnya kerajaan Bima dicatat dalam naskah BO (Catatan Kuno Kerajaan Bima) bahwa sang Bima pertama kali berlabuh di Pulau Satonda, kemudian

bertemu dengan seekor naga sisik emas. Sang naga melahirkan seorang putri yang bernama Putri Tasik Naga dan menikah dengan sang Bima, melahirkan dua orang putra yang diberi nama Indra Kumala dan Indra Jamrud. Kedua putranya inilah menjadi cikal bakal keturunan raja-raja Bima. Setelah Bima bertemu dengan Putri Tasik Naga yang merupakan putri penguasa setempat, yaitu Ncuhi di Pulau Satonda. Sejak itulah hubungan nyata dengan Pulau Jawa terjalin. Sang Bima juga diduga sebagai bangsawan Jawa. Bima juga tercatat dalam kitab *Negarakertagama*, wilayah kekuasaan Majapahit (Ismail, 2017)

Sebelum menjadi sebuah kerajaan, semua *Ncuhi* mempersatukan semua daerah yang ada di Kota Bima. Selama puluhan tahun sang Bima berada di Jawa Timur, sang Bima pun mengirim dua orang putranya yang bernama Indra Kumala dan Indra Jamrud. Indra Jamrud dijadikan anak angkat oleh Ncuhi Dara, sedangkan Indra Kumala dijadikan anak angkat oleh *Ncuhi Doro Wani*. Setelah itu, semua *Ncuhi* melakukan musyawarah dan mufakat (*Mbolo Ro Dampa*) untuk menentukan pemimpin atau raja di Bima dan Dompu. Hasil dari kesepakatan itu Indra Jamrud dijadikan sebagai raja di Kota Bima, sedangkan Indra Kumala dijadikan sebagai raja di daerah Dompu. Indra Jamrud adalah raja pertama di Bima. Setelah Indra Jamrud memiliki ilmu pengetahuan dalam memerintah, maka berakhirilah zaman *Ncuhi* dan masyarakat Bima memasuki zaman baru, yaitu zaman kerajaan.

Raja-raja pada zaman kerajaan klasik adalah sebagai berikut:

1. Indra Jamrud
2. Batara Indra Bima

3. Batara Sang Luka
4. Batara Bima
5. Maharaja Mitra Indra Tarati
6. Manggampo Jawa
7. Maharaja Bima Indra Sari
8. Bilmana
9. Manggampo Donggo
10. Ma Wa,a Paju Longge
11. Ma Wa,a Ndapa
12. Mantau Asi Sawo
13. Salisi Mantau Asi Peka

Sejak berdirinya kerajaan Bima sekitar pertengahan abad ke-11 M, daerah Bima memiliki dua nama yang dikenal oleh masyarakat sampai saat ini yaitu, Bima dan Dana Mbojo. Jabatan pada masa klasik, yaitu jabatan seperti *Tuteli Ngampo* rumah bicara (perdana menteri), *Rato Jeneli I* (mentri), dan jabatan lainnya (Harahap, 2006).

2.2.4 Zaman Kesultanan (Zaman Islam)

Perkembangan Kota Bima pada masa kesultanan yang pertama adalah Sultan Abdul Khair I yang berkuasa pada tahun 1601-1640 M. Sultan yang pertama yang membawa Islam dari Makassar ke daerah Bima dan memeluk agama Islam. Selain itu dibangun pula sebuah masjid yang berlokasi jauh dari Kota Bima saat ini.

Adanya konflik perebutan kekuasaan yang terjadi pada saat itu antara pamannya yang bernama Salisi yang diketahui ingin menggulingkan kekuasaan sultan pada saat itu. Maka, Sultan Abdul Khair I meminta bantuan pada Kerajaan Gowa untuk membantu merebut kembali kekuasaan di tangan pamannya yang bernama Salisi. Setelah berhasil merebut kembali kekuasaan dari pamannya, maka ia mendirikan sebuah masjid yang saat ini dikenal dengan Masjid La Kai Lamina, yang dibangun tepatnya di Desa Kalodu, Kecamatan Langudu dan merupakan masjid pertama di Kabupaten Bima (Haris, n.d.2006).

Pemerintahan selanjutnya adalah Sultan Abdul Khair Sirajuddin (1640–1682 M). Pada masa pemerintahannya, ia berhasil menolak perjanjian Bongayya dan membangun sebuah benteng yang bernama Benteng Asa Kota pada tahun 1667. Ia juga menjadi target penangkapan VOC. Tak hanya itu, pada masa pemerintahannya ia juga menciptakan tarian-tarian upacara adat, seperti atraksi kesenian tradisional yang masih ada hingga saat ini. Pada bidang birokrasi, Sultan Abdul Khair Sirajuddin melakukan penyempurnaan struktur pemerintahan dengan mendirikan lembaga baru secara hukum yang beranggotakan para ulama dan tokoh agama. Bidang keamanan struktur organisasi mengikuti Makassar, angkatan perang dipimpin oleh seorang perwira tinggi yang bernama Bumi Pabise Mbojo dan dibantu oleh Bumi Pabise Bolo, dan Kae. Untuk meningkatkan kemampuan personil angkatan laut dibimbing oleh para perwira angkatan laut Makassar. Untuk melengkapi prasarana angkatan perang, Sultan Abdul Khair Sirajuddin membeli senjata modern, seperti meriam dan *bedil* (senapan) dari portugis (Rahmat & Nurwahidah, 2019).

Pemerintahan yang ketiga dipimpin oleh Sultan Nuruddin Abubakar Aliasyah (1682—1687 M). Pada masa kepemimpinannya, ia membantu perang Trunajaya, sempat ditawan di Jakarta dan mendirikan kampung Tambora di Jakarta Barat, serta sebuah masjid berarsitektur khas Bima dengan dibantu oleh sisa pasukannya.

Para ulama bukan hanya *ubudiah*, tetapi juga ikut bertanggungjawab dalam perkembangan kebudayaan agar kebudayaan tersebut berpedoman pada nilai dan moral bersyariat Islam. Maka dari itu, diangkatlah seorang *Mufti* yang memiliki kemampuan dalam merumuskan kebudayaan (adat istiadat) yang Islami melalui metode dan analogi atau *qias*. Tetapi, tetap ada masyarakat yang mencampurkan adat Islam dan adat yang lama.

Setelah berakhirnya kepemimpinan Sultan Nurudin Abubakar, maka dilanjutkan oleh Sultan Jamaluddin (1687—1696 M). Pada pemerintahannya mulai muncul tekanan dari Belanda dengan monopoli perdagangan di daerah Bima pada saat itu, tawaran itu berhasil ditolak oleh Sultan Jamaluddin. Pada akhirnya pihak Belanda membuat jebakan dengan menuduh membunuh bibinya permaisuri Sultan Dompu, maka dari itu Sultan Jamaluddin diadili dan ditahan di Benteng Rotterdam, lalu kemudian ditahan di Batavia pada tahun 1695. Sementara itu, pemerintahannya mampu mempertahankan kedudukan Kesultanan Bima sebagai pusat perdagangan dan pusat penyiaran Islam, serta berjuang melawan penjajah di wilayah Nusantara bagian Timur; mengambil alih peranan Makassar dan Ternate yang kian melemah.

Berikutnya, pada pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1697—1731 M, tidak banyak perubahan yang terjadi dari pemeritahan sebelumnya. Peran Kerajaan

Bima tetap seperti semula, hanya saja pembaharuan struktur organisasi pemerintahan terutama pada bidang agama berhasil menyebarluaskan syariat Islam di daerah taklukannya melalui pendekatan seni dan budaya (Ismail, 2017).

Sultan Alauddin Muhammad pada tahun 1731—1742 M, melanjutkan masa pemerintahan sebelumnya. Hal yang dilakukan adalah menjalin hubungan politik, ekonomi, dan perdagangan dengan Makassar. Upaya penyebaran agama Islam terus dilakukan di wilayah kekuasaannya, seperti di Manggarai dan Sumba, terutama di daerah Donggo dan Donggo Ipa. Karena, masyarakat belum meninggalkan kepercayaan lama yang tidak sesuai dengan syariat Islam, semua budaya yang tidak sesuai dengan norma dan nilai Islam tidak harus ditinggalkan.

Pada pemerintahan Sultan Abdul Kadim tahun 1742—1772 M. Keadaan pemerintahan tidak mengalami perubahan yang menonjol. Perjalanan perekonomian masih sama seperti pemerintahan sebelumnya. Setelah pemerintahannya berakhir dan digantikan oleh Sultan Komalasyah pada tahun 1747—1751 M, tidak terdapat perubahan yang serius pada struktur pemerintahan Bima akibat perdana menteri Gowa yang sering bekerjasama dengan Belanda. Akhirnya, Belanda berhasil melawan Komalasyah bersama anaknya yang bernama Amas Madina dan dibuang ke Batavia. Kemudian, dibuang ke Ceylon, Srilanka dan meninggal di pengasingannya pada tahun 1751 M.

Pemerintahan selanjutnya, yaitu Sultan Abdul Hamid pada tahun 1773—1819 M. Pada masa pemerintahannya, Sultan Abdul Hamid sangat lihai berdiplomasi dan berkorespondensi. Selain itu, ia menciptakan mahkota kerajaan, bendera dan

lambang Kesultanan Bima dengan burung garuda yang berkepala dua yang melambangkan perpaduan hukum adat dan hukum Islam (Mawaddah, 2017).

Pemerintahan selanjutnya adalah Sultan Ismail yang sifatnya sangat halus dan lembut. Pada saat itu, Bima dalam kekuasaan Inggris. Selain itu, letusan Gunung Tambora, mengakibatkan semua lahan pertanian, peternakan, dan tambak-tambak harus diperbaiki, penyempurnaan angkatan laut dan bersenjata yang diberi nama *pabise*, serta membangun masjid dan musala di seluruh Kesultanan Bima.

Pada masa ini perekonomian mulai menggembirakan, tetapi masalah yang dihadapi adalah usaha Belanda untuk menguasai Kesultanan Bima dan pemaksaan untuk menandatangani kontrak dan perjanjian yang merugikan Kesultanan Bima. Untuk menghadapi Belanda, Sultan Abdullah memodernisasi peralatan dan persenjataan yang diperoleh dari Inggris dan Portugis. Selain itu, memperkuat dakwah di wilayah taklukan, seperti Manggarai, Sumba, Larantuka, dan Sawu. Secara mengejutkan Wajir Muhammad Yacub membubarkan angkatan laut Bima *pabise* yang mengakibatkan melemahnya posisi kesultanan Bima di wilayah Laut Flores ketika sedang gigih untuk melawan Belanda. Pada pemerintahan selanjutnya dipimpin oleh Sultan Abdul Azis. Pada masa ini hubungan Belanda dan Bima seperti api dan sekam. Belanda terus berusaha memaksa Sultan Abdul Azis untuk menandatangani perjanjian dan kontrak. Hal ini membuat pro dan kontra di kalangan majelis adat dan pejabat kerajaan. Alhasil, pihak yang kontra memutuskan untuk keluar dari istana. Sehingga, kelompok yang keluar ini yang menimbulkan Perang Ngali pada tahun

1908—1909, Perang Kala 1908, Perang Rasa Ngaro 1910, dan Perang Dena 1910

(Supriatman, 2014).